



Pengukuhan Guru Besar

Bidang Ilmu Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Jakarta

rof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon, S.Pd., M.Si.

Orasi Ilmiah:
**“Resolusi Konflik
Ambon 1999-2002
Pelajaran Berharga
dalam Menjaga
Perdamaian
di Indonesia”**



12

JUNI
2025

Aula Latief Hendraningrat
Gedung Dewi Sartika
Universitas Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Pengukuhan Guru Besar
Bidang Ilmu Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Jakarta

P

rof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon, S.Pd., M.Si.

Orasi Ilmiah

**Resolusi Konflik Ambon 1999-2002
Pelajaran Berharga dalam Menjaga Perdamaian
di Indonesia**

Kamis, 12 Juni 2025

Aula Latief Hendraningrat
Gedung Dewi Sartika
Universitas Negeri Jakarta

Pengukuhan Guru Besar
Bidang Ilmu Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Jakarta

Orasi Ilmiah

Resolusi Konflik Ambon 1999-2002
Pelajaran Berharga dalam Menjaga Perdamaian di Indonesia

Penulis

Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon, M.Si.

Reviewer

Prof. Dr. Ahman Sya, S.Pd., M.Pd.

Perancang Grafis

Dr. Indro Moerdisuroso, M.Sn.
Zaitun Y.A. Kherid, M.Pd.

Ukuran dan Halaman

21 x 14,5 cm
52 + iv halaman

Penerbit

Universitas Negeri Jakarta
2025



UNJ PRESS

Gedung Rektorat Lantai 1, Kampus A UNJ
Jalan Rawamangun Muka, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur



UNJ Press telah menjadi anggota:

Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
No. Anggota: 001.126.1.10.2020



Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)
No. 585/Anggota Luar Biasa/DKI/2020

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Yang saya hormati,

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI

Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta

Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta

Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Jakarta,

Kepala Badan, Ketua Lembaga dan Direktur di Lingkungan UNJ

Para Guru Besar UNJ dan Para Guru Besar Tamu

Kordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Para Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Para Tamu Undangan, Sahabat dan Segenap Anggota Keluarga yang berbahagia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri upacara Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Jakarta yang terhormat dan mulia ini. Tak lupa, shalawat serta salam kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia, amanah sebagai seorang Guru Besar, Bidang *Kepakaran Damai dan Resolusi Konflik* pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta.

Saya menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara Pengukuhan Guru Besar saya.

Dalam suasana yang penuh khidmat ini, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul: “*Resolusi Konflik Ambon 1999-2002 Pelajaran Berharga dalam Menjaga Perdamaian di Indonesia*”

A. Pengantar

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan keberagaman masyarakat yang tinggi. Namun tanpa disadari, ketidakmampuan mengelola keberagaman dan ketidaksiapan sebagian masyarakat menerima keberagaman, mengakibatkan terjadinya berbagai konflik yang membahayakan integrasi bangsa. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman, dan kemampuan dalam mencari Solusi penyelesaian konflik atau dikenal dengan istilah *resolusi konflik* sehingga potensi konflik dapat kelolah menjadi kekuatan yang memperkuat integritasi bangsa , bukan sebaliknya potensi konflik yang kita miliki menjadi ancaman desintegrasi bangsa

Resolusi Konflik merupakan bagian dari strategi penciptaan perdamaian yang memiliki tujuan khusus untuk mengatasi konflik dari akar masalah. Faktor faktor yang menjadi penyebab konflik, terutama faktor struktural, kultural dan tindakan yang menjadi penyebab konflik, menjadi perhatian khusus dari resolusi konflik. Semua itu dapat disebut penyelesaian konflik berorientasi pada pemecahan masalah, atau *problem solving conflict resolutin* (Lambang Trijono: 2018)

Resolusi Konflik sebagai bidang ilmu khusus tersendiri, mulai berkembang pada era pasca perang dingin. Resolusi konflik awalnya mulai muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an. Ketika perkembangan senjata nuklir dan konflik antara negara adi kuasa mulai mengancam kehidupan manusia. Sekelompok ilmuan pelopor dari berbagai disiplin ilmu, melihat manfaat mempelajari konflik sebagai sebuah fenomena umum yang terjadi dalam hubungan antar bangsa, politik, hubungan industri, komunitas, keluarga dan antara individu, termasuk konflik sipil dan militer (Hough, Oliver, dan Tom, 2000).

Di Indonesia konflik menjadi studi yang menarik selepas reformasi, dimana muncul berbagai konflik horizontal dan vertikal di Indonesia yang mengancam integrasi bangsa. Pada tahun 2021, UGM mendirikan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, yang merupakan program S2 pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang memusatkan perhatian pada kajian perdamaian dan konflik. Selain UGM, Universitas Pertahanan juga memiliki Prodi Damai dan Resolusi Konflik. Sebagai negara yang memiliki multi etnik agama dan budaya Indonesia dapat menjadi laboratorium dalam mempelajari model penyelesaian konflik dan perdamaian.

Konflik di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai saat ini, yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni 1) konflik yang bersifat horizontal, konflik antara sesama masyarakat dan 2) konflik vertikal antara masyarakat dan negara. Pada era Sukarno, konflik yang bersifat vertikal diselesaikan dengan cara operasi militer, seperti Pemberontakan Madiun 1948, DITII, RMS, PRRI/Permesta dan G30S PKI (Jusuf Kalla, UGM : 2005).

Pemerintah Indonesia lebih banyak menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dengan pendekatan militer atau senjata, sehingga persoalan semakin meluas dan bergeser dari akar permasalahan penyebab konflik (Huntington, 2003). Dalam pemerintahan Orde Baru, pemerintah memfokuskan perhatiannya pada program pembangunan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dengan penekanan pembangunan dibidang, seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan secara merata menyebabkan gejolak pemberontakan di daerah, mengalami penurunan. Konflik sosial dan politik di era pemerintahan orde baru dapat kendalikan dengan pendekatan militer dan birokrasi yang kuat.

Berakhirnya pemerintahan orde baru, muncul berbagai konflik yang sifatnya vertikal dan horizontal yang berbasis pada ikatan primordial agama, suku, budaya, dan sejarah. Konflik vertikal di Papua, Aceh dan Timor Timur. Konflik horizontal terjadi di Kalimantan antar suku Dayak dan Madura, konflik Poso, Ambon, seakan menjadi penanda akan ancaman disintegrasi bangsa.

Lepasnya Timor Timur dari NKRI tahun 1999 dan peningkatan eskalasi konflik Aceh, Ambon dan Papua banyak pihak yang memprediksi akan terjadinya teori *domino effect*, di Indonesia. Di mana kemerdekaan Timor Timur akan diikuti oleh Papua, Aceh, Ambon dan selanjutnya bubarnya Indonesia. Sesuatu yang sulit di bayangkan sebelumnya, Kota Ambon yang telah lama menjadi kota multikultural dan memiliki kekuatan kearifan lokal. Pela Gandong, masyarakat Ambon memiliki hubungan kekerabatan dan pertemanan yang erat bisa terlibat dalam konflik horizontal 1999.

Kota Ambon sejak abad ke-16, sudah menjadi kota yang multietnik, berbagai suku bangsa menetap di sekitar wilayah Benteng Victoria. Benteng Victoria didirikan oleh Portugis pada tahun 1575. Di era Kolonial Belanda Benteng Victoria menjadi pusat pemerintahan Belanda. Aktivitas sosial dan ekonomi berlangsung di sekitar Benteng Victoria. Di sekitar benteng Victoria banyak bermukim penduduk keturunan Arab dan China, Jawa dan Makasar, mereka berperan dalam bidang perdagangan (Arsip Nasional, 1982)

Orasi yang kami sampaikan ini, merupakan bagian dari hasil penelitian, kerjasama Universitas Pattimura Ambon dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantnas) di tahun 2010. Sekjen Wantanas saat itu dijabat Letjen Bambang Darmono.

Yang mejadi Informan dalam penelitian, para raja negeri, para tokoh agama, akademisi, pemangku kebijakan, yang mengikuti dan menandatangani perjanjian Damai Malino II.

Kami juga berkesempatan melakukan *In Depth Interview* atau wawancara mendalam kepada anggota Laskar Jihad yang ikut serta dalam konflik Ambon, antara lain, Panglima Laskar Jihad Ustad Jafar Umar Talib. Selain ikut serta dalam konflik Ambon, Ustad Jafar Umar Talib pernah bergabung dengan milisi Mujahidin saat perang melawan Rusia di Afganistan 1987.

Di tahun 2016, dengan dukungan dari Wakil Kedua DPD RI Dr Nono Sampono dan Dubes Indonesia di Belanda, I Gusti Agung Wesaka kami berkesempatan melakukan *In - Depth Interview* atau wawancara

mendalam dengan Disapora Keluarga Ex KNIL asal Maluku di Den Haag Belanda, yang kami wawancara adalah generasi kedua dan ketiga

Peralihan dari sebuah pemerintahan yang semi demokrasi (Orde Baru) yang didukung oleh kekuatan militer ke pemerintahan demokrasi (Orde Reformasi), yang sangat bebas tanpa ketegasan hukum sering memunculkan konflik horizontal dan vertikal yang membahayakan eksistensi kehidupan bernegara.

Konflik Ambon 1999, banyak dijadikan sebagai kajian resolusi konflik oleh para peneliti dari dalam dan luar negeri. Konflik yang terjadi di Ambon sendiri merupakan salah satu contoh dari fenomena konflik sosial ekonomi dan politik lokal yang berubah menjadi isu agama dan etnis yang mengorbankan 5000 jiwa dalam 2 tahun, dari periode waktu, korbannya lebih besar dari konflik vertikal Aceh yang berlangsung lebih dari sepuluh tahun (Jusuf Kalla, 2024).

Konflik Ambon yang awalnya bersifat konflik komunal antar warga kemudian meluas menjadi konflik trans nasional, melibatkan kekuatan asing yang terlibat dalam konflik Ambon dan isu tentang konflik Ambon menjadi isu internasional yang diberitakan oleh berbagai media Internasional (Helmia Asyathri dkk., 2014).

Konflik Ambon meletus pada era Presiden BJ Habibie, disaat Presiden BJ Habibie menghadapi problem yang sangat kompleks memulihkan krisis ekonomi nasional, dan menghadapi tuntutan kemerdekaan Timor Timur, Aceh dan Papua. Banyaknya agenda reformasinya harus diselesaikan menyebabkan perhatian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan konflik Maluku kurang terfokus.

Tabel 1. Kronologis Konflik Ambon

Tahun	Bulan	Peristiwa
1999	Januari	Pertengkaran antara Sopir Angkot.
	Februari	Kekerasan menyebar dengan menggunakan senjata api, <i>Sniper</i> dan Bom Molotov baik warga maupun masyarakat.
	Maret- April	Kekerasan massal menyebar tidak hanya di Kota Ambon tetapi di Maluku.
	Mei	Pawai obor dan deklarasi perdamaian Maluku. Kampanye pemilihan umum dimulai kekerasan juga mulai berkurang.
	Juni	Pemilihan Umum.
	Juli - September	Kekerasan massal mulai lagi di Ambon.
	Oktober	<i>Direct Contact</i> antara dua komunitas yang bertikai.
	Desember	Konflik meningkat setelah Gereja Silo dan Masjid An Nur di bakar.
2000	April	Rekonsiliasi konflik makan patita dan pamai damai yang berujung pengeroyokan sepuluh pengemudi becak.
	Mei	Kedatangan Laskar Jihad di kota Ambon
	Juni	Darurat sipil diberlakukan.
	Desember	FKM mendeklarasikan kemerdekaan.
2001	Januari	Batalyon Gabungan (Yon Gab) melakukan operasi penyerbuan kepada kelompok sipil bersenjata dan melucuti senjata api yang dimiliki oleh sipil.
	Juni	Penangkapan aparat yang terlibat dalam kerusuhan.
2002	Februari	Perjanjian damai Malino II di tandatangani.

Sumber : Helmia Tim (2014)

Konflik Ambon berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan dan ekonomi. Ambon menjadi tertinggal dari segi pembangunan, pendidikan dan perekonomian, tidak ada jalan lain dalam menyelamatkan Ambon dari keterpurukan selain masyarakat Ambon yang harus

berdamai. Damai adalah kata kunci agar dapat keluar dari kesengsaraan akibat konflik (Lutfi Sanaky, 2023).

Merintis jalan menuju perdamaian harus dilakukan, meski itu merupakan hal yang tidak mudah, mengingat masing-masing pihak yang berkonflik menjadi korban, korban nyawa dan harta benda serta banyak dari masyarakat Ambon yang tidak mau berdamai, menolak perdamaian dan persepsi mereka berdamai berarti mengakui kekalahan. Banyak dari masyarakat yang telah menikmati hidup dalam konflik, motif terlibat dalam konflik beragam, mulai dari motif balas dendam, perang suci dan motif ekonomi. (Jusuf Kalla, 2024)

B. Penyelesaian konflik Ambon

Penyelesaian Konflik Ambon melewati proses yang sangat panjang, melibatkan pemerintah daerah, pemerinah pusat, perguruan tinggi, tokoh adat, agama dan dukungan dari berbagai lembaga asing. Pada tanggal 12 Februari 2002, momentum penting untuk perdamaian di Ambon terjadi ketika pihak-pihak yang bertikai berhasil menyepakati dan menandatangani Deklarasi Malino II di Malino Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Deklarasi tersebut merupakan hasil dari dialog panjang antara tokoh-tokoh agama dan adat Ambon dan kemudian dipertemukan kedua pihak yang bertikai yang dimediasi oleh pemerintah pusat melalui Menko Kesra Jusuf Kalla dengan kesepakatan yang memikat kedua belah pihak (M Rijal, M Rasyid:2018).



Gambar 2. Strategi Penyelesaian Konflik Ambon

Resolusi konflik Ambon tidak hanya diintervensi oleh pemerintah pusat *top-down*, tetapi juga atas inisiatif dan peran aktif dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, Pemerintah Daerah *bottom up*. Penyelesaian damai konflik Ambon menjadi contoh penyelesaian konflik yang dilakukan secara holistik, secara dengan melibatkan berbagai pendekatan, yakni **1) Pendekatan Keamanan 2) Dialog Damai 3) Optimal Potensi Damai, 4) Perjanjian Damai 5) Rehabilitasi dan penegakan hukum.**

1) Pendekatan Keamanan

Banyak pihak menyangkan konflik Ambon bisa terjadi, andaikan saat itu pendekatan keamanan dilakukan sejak awal, maka dengan kekuatan intelijen yang dimiliki oleh TNI dan Polri konflik Ambon dapat dicegah. Sebelum peristiwa kerusuhan Ambon 19 Januari 1999, sudah terdengar isu yang berkembang di masyarakat kedua komunitas agama Islam dan Kristen, akan terjadi kerusuhan di Ambon. Tanda-tanda akan adanya kerusuhan dimulai dengan prakondisi dimana muncul beberapa

konflik dalam skala kecil di Ambon, masyarakat di komunitas Islam dan Kristen dibuat resah dengan isu akan adanya konflik.

Sebelum konflik Ambon 19 Januari 1999, Gubernur Maluku Dr. Saleh Latuconsina DEA melakukan langkah proaktif mencegah terjadinya konflik, dengan melakukan koordinasi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama. Gubernur Dr. Ir. Saleh Latuconsina DEA dalam kunjungan di Universitas Pattimura, mengingatkan warga kampus terkait kondisi keamanan di Ambon, dengan datangnya preman asal Maluku dari Jakarta ke Ambon. Kembalinya sekelompok pemuda preman asal Maluku dari Jakarta ke Ambon, setelah peristiwa Ketapang menjadi tanda tanya, untuk apa mereka berangkat ke Ambon dan siapa yang membiayai transportasi mereka.

Kerusuhan Ambon yang terjadi pada saat Hari Raya Idul Fitri 19 Januari 1999, memperlihatkan tidak berperannya intelijen TNI dan Polri dalam merespon isu akan terjadinya konflik di Ambon yang berhembus kuat di masyarakat. Tidak ada persiapan antisipasi konflik oleh aparat keamanan menyebabkan konflik Ambon dengan cepat meluas ke berbagai titik di Ambon.

Kasus Konflik Ambon menunjukkan bahwa tidak semua kekerasan yang terjadi di masyarakat ditangani oleh aktor negara. Kekerasan komunal yang terjadi di Ambon karena kegagalan strategi negara menangkal beberapa kekerasan yang terjadi sebelum peristiwa 19 Januari 1999 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. (Pangabean S. R, 2018)

Dalam pendekatan keamanan, *security approach* kekuatan intelijen memainkan peran terdepan dalam melakukan deteksi dini dari sebelum datangnya ancaman. TNI dan Kepolisian, memiliki perangkat intelijen tetapi gagal melakukan deteksi dini dalam mengantisipasi peristiwa berdarah 19 Januari 1999. Peristiwa konflik Ambon bukan suatu peristiwa yang terjadi secara spontan, tetapi melewati perencanaan yang matang.

Kegagalan intelijen dalam melakukan deteksi dan pencegahan kerusuhan Ambon, menyebabkan, kegagalan dalam penanganan kerusuhan, dihari H kerusuhan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah

pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah pusat dalam penanganan darurat konflik adalah dengan pengiriman pasukan dari kesatuan Divisi II Kostrad Makasar, Brimob Polri Kelapa II, dan Marinir AL. Pengiriman pasukan Kostrad, Brimob untuk sementara dapat menahan terjadinya konflik terbuka.

Para elit politik, selalu menuduh inteljen Indonesia lemah, sehingga muncul berbagai kerusuhan selepas era Suharto. Mereka lupa sistem telah berubah, di era orde baru, menerapkan sistem otoriter, serba rahasia, keputusan dapat diambil secara cepat, inteljen bisa melakukan tindakan represif, berbeda dengan era demokrasi, yang menuntut secara berlebihan sistem transparansi, serba birokrasi berbelit, keputusan tidak bisa diambil secara cepat.

Paling terpenting, pengguna inteljen dalam hal ini penyelenggaraan negara, di era reformasi, sering mencuci tangan atas kesalahan yang dilakukan. Semestinya kesalahan anak buah, harus diambil alih oleh pimpinan di atasnya. Seorang pemimpin harus berani menanggung resiko untuk tidak populer, bukan justru hanya mencari popularitas, seperti pemain dan sandiwara, yang selalu merindukan tepuk tangan publik (Hendro Priyono, 2021).

Letjen Pur ZA Maulani yang menjadi Kepala Bakin di era BJ Habibie berbeda dengan era sebelumnya. BAKIN di bawah kepemimpinan ZA Maulani, mengalami banyak hambatan BAKIN berada pada keadaan yang menyedihkan, di satu sisi karena faktor krisis ekonomi BAKIN 1998 mendapatkan dana APBN yang minim, di sisi lain pasca perang dingin BAKIN tidak lagi mendapatkan dukungan dan bantuan negara Barat (Ken Conboy, 2008).

Pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik dengan mengirimkan pasukan TNI dan Polri adalah suatu keputusan yang tepat pada saat itu. Akan tetapi, aktor yang bermain dalam konflik Ambon menggunakan strategi menyebar berbagai informasi yang memecah belah dan menyulut konflik, ini menyebabkan masyarakat terhasut, sehingga dalam waktu cepat konflik menyebar ke berbagai titik. Masyarakat dan pihak keamanan pemerintah, seakan bingung melihat konflik yang tidak biasanya terjadi di Ambon

Penempatan pasukan TNI dan Polri yang di BKO (Bawah Kendali Operasi) dari pusat untuk pengamanan, sementara waktu dapat menurunkan eskalasi konflik. Tetapi tidak dapat mengakhiri konflik, karena kehadiran TNI dan Polri fungsinya untuk pengamanan, bukan menyelesaikan akar permasalahan konflik.

Meskipun pasukan keamanan (TNI dan Polri) telah terlibat dalam misi perdamaian pasukan Garuda *Peacekeeping* dari tahun 1957, tetapi TNI dan Polri saat kerusuhan Ambon belum dilatih sebagai pasukan yang mendamaikan kerusuhan dengan motif SARA, sehingga banyak dari aparat yang tidak memahami kehidupan sosial budaya dari etnik yang berkonflik.

Pendekatan keamanan dengan menempatkan pasukan TNI Polri dititik perbatasan antara wilayah dua komunitas yang berkonflik, menyebabkan masyarakat semakin terpolarisasi berdasarkan identitas agama dan masyarakat yang bertikai menggunakan simbol untuk menunjukkan perbedaan identitas komunitas Kristen menggunakan simbol kain ikat kepala merah, dan komunitas Islam menggunakan ikat kepala kain berwarna putih. Terjadi pengungsian warga secara besar-besaran untuk mencari pemukiman yang punya kesamaan agama dan meninggalkan pemukiman yang berbeda identitas agama, padahal selama puluhan tahun mereka hidup rukun dan damai. Konflik 1999 telah memisahkan masyarakat Ambon karena perbedaan agama. (Hida D Rolobessy, 2023)

Penugasan pasukan TNI dan Polri dalam waktu yang lama di Ambon, telah menyebabkan ikatan emosional terbangun antara pasukan TNI dan Polri dengan komunitas warga, pasukan keamanan yang harusnya netral ikut dan terlibat di dalam konflik dengan berbagai motif dan latar belakang (AH Fatgehipon, 2022).

Pasukan TNI dan Polri yang tidak terlatih dalam mendamaikan konflik dengan latar belakang agama, menyebabkan banyak anggota TNI dan Polri yang ikut terbawa emosional dalam konflik bernuansa SARA, sehingga di antara kedua komunitas yang bernilai masing-masing menganggap aparat keamanan tidak berlaku adil. Komunitas Kristen menilai, TNI lebih banyak berpihak kepada muslim sedangkan dari

kalangan Islam menganggap Polisi Brimob lebih berpihak kepada komunitas Kristen. TNI dari kesatuan Marinir, masih dianggap netral oleh kedua komunitas baik Islam dan Kristen (AH Fatgehipon, 2024).

Konflik Ambon, sulit diatasi dengan menggunakan pendekatan militer bersenjata, sebab aparat keamanan di lapangan yang ditugaskan mendamaikan kelompok yang bertikai, terlibat dalam konflik, konflik yang berisukan SARA, menyebabkan aparat keamanan yang bertugas terbelah ikut membela komunitas agama masing masing. Aparat keamanan yang awalnya netral dalam menjaga keamanan di lapangan berubah menjadi berpihak kepada salah satu komunitas, kondisi ini menyebabkan konflik konflik Ambon sulit di selesaikan (Didi Setiadi, 2002).

Salah satu peran TNI dan Polri dalam konflik Ambon adalah menjadikan markas TNI dan Polri sebagai tempat terbuka untuk pengungsian masyarakat korban konflik Ambon. Markas TNI yang paling terbanyak menampung para pengungsi dari semua komunitas agama adalah Lantamal (Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut) yang terletak di Negeri Halong Ambon. Selain Lantamal ada juga, sekolah pendidikan TNI AD Suli Ambon, yang menampung pengungsi dari dua komunitas. Pengungsi yang terdata di Lantamal Halong sekitar 30 ribu pengungsi, mereka memilih mengungsi di Lantamal karena aman dan strategis dapat menggunakan kapal laut meninggalkan Ambon (Lambang Trijono, 2001).

2) Dialog Damai

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan konflik adalah membangun dialog damai, antara warga masyarakat yang berkonflik komunitas Islam maupun Kristen, dengan adanya dialog secara langsung ke masyarakat diharapkan bisa terbangun kesadaran pemahaman yang sama untuk menghentikan pertikaian.

Penghentian konflik Ambon, juga dilakukan dengan penugasan Perwira Menengah dan Perwira Tinggi asal Maluku, saat kunjungan Panglima TNI Jenderal Wiranto ke Ambon, 21 Januari 1999, Panglima Panglima ABRI kemudian menugaskan 19 Perwira Tinggi dan Menengah asal Maluku, untuk pulang kampung berdialog dengan masyarakat

mencari solusi untuk mendamaikan Ambon. Anggota Tim 19 diantaranya Letjen Suadi Marasabessy, Laksamana Muda Franky Kayhatu, Kolonel Nono Sampono. Dialog yang dibangun oleh tim bersama masyarakat di Ambon dapat menurunkan eskalasi konflik, untuk mengahiri konflik dibuat upacara adat perdamaian dilaksanakan Lapangan Merdeka Ambon, yang dihadiri oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Beberapa bulan konflik di Ambon mereda, tetapi kemudian konflik terjadi lagi (Agus Ulahay, 2023).

Dalam upaya mencari solusi damai dari konflik Ambon yang telah meluas, ke berbagai wilayah di Maluku dan Maluku utara. Presiden BJ Habibie menugaskan para menteri ke Ambon mendengar masukan masyarakat dan pemimpin lokal, sekaligus memberikan solusi konkrit atas berbagai permasalahan di lapangan.

Para Menteri dalam Kabinet BJ Habibie yang hadir ke Ambon dalam penyelesaian konflik adalah, Menko Kesra, Haryono Suyono, Menteri Kesehatan, Farit A. Moelok, Menteri Pekerjaan Umum Racmadi Bambang Sumodhijo, Menteri Agama Malik Fajar, Menteri Sosial Yustika Baharsjah, serta Menteri Kehutanan dan Perkebunan Muslim Nasution.

Meski di era Pemerintahan BJ Habibie konflik Maluku tidak terselesaikan, tetapi BJ Habibie dapat menyelenggarakan Pemilu pertama di era reformasi dalam keadaan damai. Pelaksanaan Pemilu 1999 di Ambon dapat berlangsung dengan baik, tanpa keributan berarti pemilu 1999, membawa perubahan politik yang besar di Ambon

Presiden Gus Dur, membuka diri mendengar masukan dari kalangan akademisi, ulama, pendeta, tokoh masyarakat, ormas, guna mencari solusi penyelesaian konflik Ambon. Berbagai desakan dari perwakilan tokoh agama, dan masyarakat meminta agar pemerintah, menarik Laskar Jihad dari Ambon, dan menangkap kelompok FKM (Front Kedaulatan Maluku) yang mempropagandakan kemerdekaan Maluku

Untuk menstabilkan kondisi keamanan di Maluku, pemerintah kemudian mengirimkan Batalion Gabungan (Yon Gab) yang terdiri dari berbagai kesatuan dan matra, untuk menyisir basis-basis Laskar Jihad dan kelompok-kelompok milisi bersenjata, mereka diminta menyerahkan senjata dan meninggalkan Maluku. Operasi yang dilakukan oleh Yon Gab

di Ambon mendapatkan banyak perlawanan, yang menyebabkan banyak korban jiwa di Pasukan Yon Gab Gab (Sahlan Helut, 2023)

Era Presiden Gus Dur, pemerintah mencoba melakukan langkah penyelesaian konflik Ambon, dengan menertibkan pasukan keamanan yang bertugas di Ambon, mengingat konflik di Ambon sulit terselesaikan sebab yang berkonflik bukan hanya masyarakat sipil, tetapi juga anggota TNI dan Polri. Dalam berbagai pernyataan media, Presiden Gus Dur meminta agar pihak luar yang terlibat dalam berkonflik Ambon untuk meninggalkan Ambon. Sampai dijatuhkannya Gus Dur lewat sidang Istimewa MPR, konflik Ambon belum terselesaikan.

Pendekatan damai, yang dilakukan oleh Presiden BJ Habibie dan Presiden Gus Dur, bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat bertujuan membangun kesadaran bersama untuk menghentikan konflik yang dimulai dari tingkat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelajar, para pelaku usaha, dan pedagang.

Model ini sangat membantu dalam mempercepat terciptanya perdamaian di Ambon. Konflik di Ambon sulit terselesaikan sebab masyarakat tersegregasi dalam komunitas berdasarkan agama, sehingga tidak ada dialog dan komunikasi, tidak adanya interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya, prasangka dan saling curiga antara komunitas.

Pendekatan dialog damai, mengalami kendala disebabkan oleh dalam konflik Ambon yang terlibat dalam konflik bukan hanya masyarakat di wilayah Maluku tetapi juga kekuatan di luar Maluku, bahkan kekuatan internasional ikut bermain. Perdamaian di Ambon harus melibatkan semua lapisan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus terus mendorong dan menciptakan perdamaian. Kegagalan dalam penyelesaian konflik Ambon dapat bermuara kepada ancaman disintegrasi bangsa.

Hasil *In Depth Interview dengan anggota laskar Jihad*, kenapa mereka ikut dalam Konflik Ambon, pendapat mereka Pemerintah Indonesia dianggap gagal melindungi warga negaranya, mereka datang ke Ambon untuk membela saudara seiman. Mereka terpanggil melawan

gerakan separatis RMS, menjaga kedaulatan NKRI jangan sampai Ambon merdeka lepas dari Indonesia, seperti Timor Timur

Selama ini keluarga Ex KNIL asal Maluku di Belanda, mengalami stikma sebagai Pendukung RMS, dan sering dikaitkan dengan Konflik Ambon 1999-2002, dari hasil *In-Depth Interview*, kami dapat memahami pandangan dan simpati Diaspora Maluku di Belanda atas tragedi kemanusiaan konflik Ambon 1999-2002. Mereka berharap, Pasca Konflik, pemerintah Indonesia lebih memperhatikan, pembangunan di Ambon, Maluku secara adil.

Diaspora Eks KNIL di Belanda, tidak semua bersimpati kepada perjuangan RMS. Mereka bermigrasi ke Belanda bukan atas dasar keinginan mereka, mereka menjadi korban dari konflik dan perubahan politik selepas penyerahan kedaulatan kemerdekaan Indonesia, Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949

Diasporan Anggota KNIL berasal dari wilayah Maluku Tengah, Tenggara dan Maluku Utara. Istri mereka banyak yang berasal dari wanita Jawa. Keluarga Eks KNIL di Belanda mayoritas beragama Kristen Protestan, meskipun tidak banyak ada juga yang beragama Kristen Katolik dan Islam (Fridus Steijlen, 2024) .

Pertanyaan besar Diaspora Eks KNIL di Belanda, kenapa negeri, Ambon, Maluku, yang kaya akan Sumber Daya Alam, tetapi saat ini tertinggal dari segi Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Pertanyaan Diaspora Eks KNIL punya dasar argumentatif, sebab di era kolonial banyak intelektual Hindia Belanda yang berasal dari Maluku khususnya Ambon dan Saparua.

Hasil sidang PPKI pada 19 Agustus 1945 menetapkan delapan Provinsi Republik Indonesia. Tiga dari delapan orang Gubernur berpendidikan Eropa, Gubernur Sumatera Mr. Tengku Muhammad Hasan lulusan Universitas Leiden Belanda, Gubernur Sulawesi Sam Ratulangi lulusan Universitas Zurich Swis. Gubernur Maluku Mr. Johannes Latuharhary lulusan Leiden Belanda.

Jaksa Agung NIT (Negara Indonesia Timur) yang juga Presiden RMS, Dr. Cristian Soumokil lulusan Fakultas Hukum Leiden Belanda. Ini

menunjukkan semua suku di Indonesia memiliki kemampuan dan keunggulan, kalau diberi kesempatan pendidikan yang sama.

Pemerintah Daerah Gubernur Dr. Ir. Saleh Latuconsina DEA bersama Kapolda, Komandan Korem, Pangdam, Komandan Pangkalan Angkatan Laut, tokoh masyarakat, tokoh agama dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) Wilayah Maluku, Sinode GPM (Gereja Protestan Maluku, Keuskupan Maluku dan melakukan dialog damai, bersama masyarakat di tempat pengungsian maupun di wilayah pemukiman komunitas masing-masing agama. Dalam dialog damai, sering terjadi hujatan dari masyarakat kepada pemerintah, pimpinan TNI, Polri dan tokoh agama, kondisi ini bisa dimengerti masyarakat banyak mengalami depresi, akibat kehilangan harta benda dan keluarga. Para pengungsi mengalami tekanan psikologi akibat berbagai trauma saat mengalami konflik (Didi Setiadi, 2023).

Dari dialog damai yang melibatkan partisipasi tokoh masyarakat, muncul kesamaan pandangan dan kesadaran bersama, bahwa konflik Ambon bukan konflik yang muncul secara alami tetapi konflik yang dimainkan oleh banyak aktor dengan berbagai kepentingan, konflik yang dirugikan adalah masyarakat Ambon, masyarakat Ambon akan tertinggal dari segi kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan, kalau konflik terus berlanjut. Tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan masyarakat Ambon dari keterpurukan ekonomi, Pendidikan dan kesejahteraan, satu-satunya jalan adalah berdamai, lupakan yang telah terjadi, dan bangun masa depan yang lebih baik (Hadi Basama, 2023).

Masyarakat Ambon memiliki banyak potensi konflik dan dan juga potensi damai

No	Potensi Konflik	Potensi Damai
1	Agraria, Batas Negeri (Desa Adat)	Kekuatan budaya kearifan lokal Pela Gandong,
2	Solidaritas kelompok yang Tinggi	Kesetiaan pada pertemanan, mudah iba, membela orang yang di zalimi meski kadang tidak dikenal

3	Sering berkelahi dalam menyelesaikan masalah sepele	Mudah memaafkan, tidak menyimpan dendam
4	Emosional dalam merespon masalah	Musik mendamaikan konflik

Masyarakat Ambon, sejak lama dikenal memiliki kearifan lokal yang menyatukan dua komunitas yang berbeda pulau, negeri dan agama yang kita kenal dengan Pela Gandong. Pela Gandong adalah ikatan persaudaraan oleh dua atau lebih negeri adat yang berbeda agama, dan dilarang saling mengawini dengan kewajiban saling menjaga dan melindungi saling membantu, misalnya kalau ada Gereja, Mesjid atau Rumah Adat Baileu dibangun (Mus Huliselan, 2023).

Pela Gandong terikat oleh sumpah adat leluhur mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebagai contoh dapat ditampilkan Sumpah Adat antara gandong Negeri Seith yang beragama Islam di Pulau Ambon dan Negeri Ouw yang beragama Kristen di Pulau Saparua. Sumpah ini diucapkan oleh kedua masyarakat negeri pada saat upacara adat Panas Gandong (Pela). Bunyi sumpah adat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kami masyarakat Seith dan Ouw berjanji, tidak diperbolehkan kawin mengawini antara masyarakat Negeri Seith dan masyarakat Negeri Ouw walau dengan dalih apapun.
2. Kami Masyarakat Negeri Seith dan Masyarakat Negeri Ouw berjanji, akan menjaga keharmonisan hidup beragama dari masing-masing negeri dan tidak mengganggu agama masing-masing.
3. Kami masyarakat Negeri Seith dan masyarakat Negeri Ouw berjanji, akan mempertahankan adat dan budaya kedua negeri dari kepunahan atau pengaruh budaya lain, yang dapat merusak citra bangsa, negara dan kedua negeri.
4. Kami masyarakat Negeri Seith dan masyarakat Negeri Ouw berjanji, menjalin hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta selalu setia membantu meringankan beban dari waliana kedua negeri.

5. Kami masyarakat Negeri Seith dan masyarakat Negeri Ouw akan selalu hidup berdampingan, seiya sekata dan suka maupun duka (Max Manuputty Max dkk: 1997).

Saat terjadi konflik agama di Ambon, negeri yang berbeda agama justru saling menjaga dan melindungi karena mereka terikat dalam ikatan Pela Gandong. Misalnya warga Negeri Paso yang beragama Kristen, dalam perjalanan melewati Negeri Batu Merah yang beragama Islam akan dilindungi oleh warga dari negeri Batu Merah demikian sebaliknya, walaupun mereka berbeda agama, tetapi memiliki hubungan keterikatan Pela Gandong.

Negeri-negeri adat di Ambon juga menempatkan pendatang menjadi bagian dari masyarakat adat, dengan sebutan orang dagang, ini menunjukkan masyarakat negeri-negeri di Ambon sejak lama terbuka dan memiliki hubungan perdagangan dengan dunia luar, para pedagang Arab, Cina, Bugis dan Jawa, yang telah lama mendiami dan melakukan kegiatan perdagangan dengan negeri-negeri di Ambon. Sebutan orang dagang bukan hanya diperuntukan kepada para pedagang, tetapi kepada para pendatang umumnya.

. Wilayah Maluku sebagian besar merupakan wilayah hukum adat masih memiliki kepatuhan budaya terhadap nilai nilai kearifan lokal. Hukum adat dapat dipakai sebagai sarana pengendalian terhadap konflik antara negeri di Maluku dengan intervensi Pemerintah Daerah memberi penguatan kepada para Raja, Saniri Negeri, Polisi Negeri adat Kewang laut, Kewang Darat, Kewang batas batas Tanah (Judy Marria Saimima:2018).

Hubungan yang telah lama terjalin antar suku agama dan agama di bidang perdagangan menjadi potensi untuk menciptakan perdamaian di Ambon. Saat konflik Ambon, hubungan-hubungan ekonomi tetap terjalin antara sesama pedagang tradisional, para pedagang Islam yang umumnya berada di kawasan pesisir menjual hasil dagangannya ke pedagang Kristen, begitu juga sebaliknya. Hubungan yang terjalin antara sesama pedagang tradisional itu merupakan sesuatu yang natural terjadi tanpa melihat perbedaan,

Dr. Imam B Prasodjo, Direktur *Group Relations and Conflict Resolution UI*, melihat komunitas pedagang di pasar sebagai potensi dalam membangun simpul-simpul perdamaian di Ambon, sebab pasar adalah tempat yang mempertemukan hubungan lintas komunitas yang beragam, hubungan mereka jauh dari motif politik, hubungan mereka terjalin karena merasa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Model membangun perdamaian dari komunitas pasar ini sangat efektif, komunikasi di pasar tidak sebatas hanya kebutuhan ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan satu dengan lainnya, agar tumbuh saling percaya, sebagai langkah untuk menuju perdamaian.

Musik menjadi salah satu potensi damai di Ambon, kehidupan orang Ambon, tidak bisa dipisahkan dengan musik, lirik lagu Ambon banyak memberi pesan moral, hubungan persaudaraan, cinta kepada orang tua terutama ibu, kecintaan terhadap kampung halaman, musik selain menciptakan suasana riang musik bisa menyatukan perbedaan, dan melupakan konflik yang terjadi

4) Perjanjian Damai/ *Peacemaking*

Konflik Ambon yang menjadi isu internasional, mendapatkan perhatian dari berbagai negara salah satunya adalah Amerika Serikat. Presiden RI saat itu Presiden Megawati Soekarno Putri, menugaskan Menko Kesra Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjejaki perundingan damai konflik Ambon. Presiden Megawati menghindari campur tangan negara asing dalam penyelesaian konflik Ambon.

Resolusi konflik Ambon, menurut Jusuf Kalla, harus dilakukan dengan cara perundingan, komunitas yang berkonflik, dipertemukan oleh pemerintah. Dengan perundingan maka masing masing pihak akan saling terbuka, muncul kesadaran yang lahir dari nurani. Dengan perundingan konflik segera dapat dihentikan, masyarakat kembali dapat hidup secara damai (Tidore Burhanudin: 2020)

Jusuf kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono, memiliki andil yang sangat besar dalam memperjuangkan perdamaian di Ambon. Mendamaikan Ambon bukan hal yang mudah, sebab masing masing pihak tidak ingin berdamai, yang menerima perdamaian akan beri stigma

penghianat oleh masing-masing kelompok, ancaman teror dan pembunuhan mereka alami. Jusuf Kalla merangkul kelompok intelektual, pemerintah adat dan tokoh agama untuk membangun komunikasi menuju jalan perdamaian Ambon.

Jusuf Kalla membangun komunikasi dengan Gubernur Maluku Saleh Latuconsina, untuk menyematani komunikasi antara kedua komunitas yang bertikai. Komunikasi yang dibangun oleh Jusuf Kalla dan timnya bersama Pemerintah Daerah Maluku, melahirkan gagasan perundingan damai Malino II.

Kesepakatan perjanjian Malino II adalah suatu upaya untuk menghentikan pertikaian antara komunitas Islam dan Kristen, untuk mewujudkan perdamaian maka diawali dengan penghentian konflik, setelah konflik berhenti, barulah pembangunan rumah penduduk dan rumah ibadah dibangun baru. Setelah itu, relokasi pengungsi dilakukan.

Perjanjian Malino II belangsung di Malino kota kecil pengunungan Sulawesi Selatan menghasilkan kesepakatan bersama yang ditandatangani pada 12 Februari 2002. Kesepakatan perjanjian Malino II sangat memiliki pengaruh terhadap perdamaian di Ambon. Dalam perjanjian Malino II, pemerintah melakukan intervensi membuka ruang dialog antar kedua kelompok, Islam dan Kristen, lewat dialog yang melibatkan kepala adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Proses dialog bukan merupakan hal yang mudah, mengingat masing-masing pihak telah kehilangan rasa percaya. Dengan demikian, yang pertama dilakukan adalah membangun rasa saling percaya antar kedua kelompok. Meski selepas perjanjian Malino masih bermunculan letupan konflik tetapi eskalasi konflik Ambon mengalami penurunan, aktivitas pendidikan, ekonomi, mulai berangsur-angsur membaik.

Dalam perjanjian Malino, tidak hanya menyepakati perjanjian damai, tetapi juga menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai *Problem Solving Conflict Resolution* yang dikenal sebagai Deklarasi Damai Malino II.



Gambar 3. Bentuk Intervensi

Bentuk intervensi pihak ketiga, yakni terbagi atas lima langka, yaitu arbitrase, mediasi dengan kekuasaan dan konsiliasi, yakni menyediakan jalur komunikasi antara kedua pihak, membantu mengidentifikasi isu-isu yang dipertentangkan oleh mereka yang berkonflik menuju interaksi langsung, dengan tidak ada keharusan kedua belah pihak ketemu secara langsung, berikut dengan cara fasilitasi dan mediasi murni (Peter Harris dan Ben Reily, 2002).

Dalam perundingan Malino II, pemerintah memainkan peran sebagai pihak ketiga dimana pemerintah dengan kekuasaan yang dimiliki melakukan intervensi membangun komunikasi dengan TNI, Polri, Pemda, Komunitas Islam dan Komunitas Kristen, untuk menyelesaikan konflik Ambon lewat jalur perundingan. Pemerintah pusat menyiapkan tempat dan berbagai fasilitas akomodasi perlindungan keamanan kepada semua utusan untuk dapat mengikuti perundingan Malino II. Perundingan Malino II pemerintah pusat, yang diwakili oleh Jusuf Kalla (Menkokesra) dan Menkopolkum Susilo Bambang Yudhoyono, menempatkan diri sebagai fasilitator dari pihak pemerintah yang memiliki kepentingan nasional agar konflik Ambon segera berakhir.

Utusan peserta dari komunitas Islam dan Kristen terbangun kesadaran bersama, bahwa konflik Ambon harus diakhiri, agar masyarakat Ambon dapat keluar dari penderitaan, dalam konflik Ambon 1999 tidak ada pihak yang menang atau kalah, semuanya merasakan penderitaan

yang sama. Semua peserta Malino II menginginkan konflik Ambon harus diselesaikan tanpa melibatkan fasilitator dari pihak asing (NGO, negara lain). Sulit dibayangkan konflik Ambon yang sangat rumit dan memakan banyak korban jiwa, harta dapat diselesaikan lewat perundingan Malino II yang digagas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemda Maluku dan utusan dari komunitas Islam dan Kristen.

Dalam negosiasi pada perjanjian Malino II, utusan yang dikirim mewakili representasi berbagai unsur dalam komunitas agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, yang terdiri dari ada tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan utusan organisasi Mahasiswa. Dalam Perjanjian Malino II, peserta utusan masing-masing komunitas diminta menyampaikan keluhan dan menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka alami. Masing-masing komunitas memiliki permasalahan yang berbeda-beda, berbagai permasalahan ini dicatat untuk bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya perumusan kebijakan perdamaian Ambon. (Nasir Rahawarin, 2023)

Isu yang memunculkan tarik-menarik dalam perjanjian Malino II salah satunya adalah tuntutan dari komunitas Kristen untuk penarikan Laskar Jihad dari Ambon, sementara komunitas Islam menuntut untuk pembubaran dan penangkapan terhadap anggota FKM (Fron Kedaulatan Maluku) yang berafiliasi kepada gerakan separatis RMS (AH Fatgehipon, 2021). Perjanjian Malino II adalah inisiatif dari pemerintah pusat untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi di Ambon, demi tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perundingan Malino II, tidak lagi membicarakan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi mencari solusi agar dapat keluar dari konflik dan kembali pada kehidupan normal yang damai. (John Ruhlessin, 2023)

Kesepakatan damai dalam Malino II tidak akan tercapai apabila para utusan perwakilan komunitas Islam, komunitas Kristen Protestan dan komunitas Kristen Katolik memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda. Pemerintah sebagai fasilitator perundingan berhasil membangun komunikasi dan kepercayaan dari masing-masing utusan perundingan bahwa perundingan damai yang mereka lakukan bukan untuk mengakui kekalahan satu dengan yang lain, tetapi mengkomodir

berbagai berbagai keinginan bersama dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing komunitas.

Konflik Ambon tidak bisa didekati dengan cara *Adversial*, yaitu melihat penyelesaian konflik dengan pendekatan kalah atau menang, kita melawan mereka, dan harus memenangkan perundingan secara keseluruhan. Penyelesaian perundingan Malino II harus dilihat dengan pendekatan *Reflektif* dimana masing-masing utusan perunding harus terbangun rasa empati dan kesadaran bahwa konflik yang terjadi di Ambon, telah mengakibatkan penderitaan, kesengasaraan, dan korban baik materi maupun korban jiwa, maka itu konflik harus diakhiri untuk kepentingan bersama. Dalam melakukan negosiasi para utusan harus berpikir integratif dengan melihat kebutuhan dan keinginan kedua kelompok komunitas bukan hanya mengutamakan kepentingan sendiri, sebab apabila dalam negosiasi ada pihak yang merasa dirugikan maka perdamaian mungkin bisa disepakati dalam perundingan tetapi tidak bisa dilaksanakan di lapangan.



Gambar 4. Analisa Konflik

Menganalisa konflik dengan tiga pendekatan, yaitu *Adversarial*, *Reflektif* dan *Integratif*. Dimana cara adversarial, melihat konflik sebagai “kita lawan mereka, kalah atau menang, semua atau tidak sama sekali.” Kedua dengan cara *Reflektif*, yakni melihat kedalam dan merefleksikan tentang kepedihan dan kesakitan yang telah ditimbulkan oleh konflik dan

mempertimbangkan hal-hal terbaik untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Cara Integratif melihat kepada diri sendiri maupun kebutuhan untuk memahami pandangan lawan.

D. Pembangunan dan Penegakan Hukum

Dalam era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kondisi Ambon mulai berangsur-angsur normal, mulai terbangun kesadaran masyarakat untuk menjaga perdamaian secara kolektif. Era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan dan relokasi pengungsi di Ambon. Berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah Masjid dan Gereja, Kampus, Sekolah, Pasar Puskesmas, Rumah Sakit yang sempat mengalami kehancuran dibangun kembali. Pemerintah kemudian melakukan relokasi pengungsi dan membangun kembali rumah para pengungsi yang mengalami kehancuran.

Pembangunan Ambon pasca konflik membuat kesadaran masyarakat Ambon untuk menjaga dan merawat perdamaian di Ambon, mereka umumnya sudah tidak mau berada dalam kondisi konflik sosial dan agama yang sangat merugikan masyarakat Ambon dari semua aspek. Untuk memperingati perdamaian Ambon, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada periode kedua menjabat mengresmikan monumen Gong Perdamaian di Kota pada tanggal 25 November 2020.

Penyelesaian konflik harus diikuti dengan pembangunan dan penegakan hukum untuk pemenuhan rasa keadilan dari masyarakat. Penegakan hukum dilakukan selepas perjanjian Malino II, dengan mengembalikan aset, dari para pengungsi yang ditinggalkan akibat konflik. Rumah para pengungsi yang telah hangus terbakar dibangun kembali. Berbagai fasilitas umum, seperti Rumah Ibadah, Masjid, Gereja, dibangun oleh pemerintah. Fasilitas pendidikan, kesehatan dan pusat-pusat ekonomi dibangun dan difungsikan kembali, agar masyarakat dapat merasakan kehidupan secara normal.

Pembangunan ekonomi yang berdampak secara langsung kepada kesejahteraan penduduk. Konflik Ambon yang berlangsung dalam waktu

yang lama antara tahun 1999-2021 menyebabkan, banyaknya korban jiwa, cacat fisik, depresi mental dan kerusakan infrastuktur di Ambon.

Konflik Ambon 1999 menyebabkan Ambon menjadi kota yang tertinggal, puluhan tahun terbelakang, tertinggal dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur layanan publik. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan tidak adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum untuk berinvestasi di Ambon, ini menyebabkan pendapatan daerah dan peluang kerja di Ambon menjadi rendah, semasa konflik tingkat pengangguran sangat tinggi di Ambon.

Banyak investor swasta yang memilih memindahkan investasi dari Ambon, dan memilih berinvestasi di kawasan yang aman dan memiliki kepastian hukum, bagi investor dan pelaku usaha. Salah satu perusahaan swasta yang menyerap lapangan kerja di Ambon adalah perusahaan pengelolaan kayu triplek (*plywood*) yang terletak di Batu Gong Ambon. Pabrik pengolahan kayu di Batu Gong Ambon menyerap sebanyak 25.000 tenaga kerja, Presiden Soeharto meresmikan Pabrik di Batu Gong pada 16 Januari 1985 (Dwipayana & Nazarudin, 2003).

Selepas kesepakatan perjanjian Malino II, pemerintah pusat mempercepat pembangunan Ambon, dengan infrastruktur yang baik, layanan kesehatan, pendidikan, fasilitas publik lain dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga membuka masuknya investasi dari luar Kota Ambon. Seiring dengan mulai membaik kondisi keamanan di Maluku, investasi swasta mulai banyak yang masuk ke Ambon. Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku, mengalami kemajuan pembangunan yang pesat, pembangunan fasilitas publik untuk mendukung percepatan kemajuan ekonomi masyarakat dan daerah, yang sangat jauh tertinggal akibat konflik 1999.

Suasana keamanan Kota Ambon yang kondusif, membuat banyak investasi swasta masuk di Kota Ambon, seperti investasi dari PT. Ciputra dalam bidang properti, dengan membangun perumahan Ciputra di Desa Halong Kota Ambon. Pembangunan Maluku City Mall, Mall City Center dan PT. Lippo membangun Rumah Sakit Siloam di Teluk Kota Ambon. Pembangunan fasilitas Hotel Aston di pantai Natsepa dan Hotel Swis Bell yang bertaraf Internasional.

Untuk mempercepat akses antara Kawasan Ambon yang terpisah oleh teluk, Pada Tanggal 17 Juli 2011, Presiden Susilo Bambang Susilo Bambang Yudhoyono, memulai pembangunan jembatan merah putih yang menghubungkan kawasan di Teluk Ambon. Pulau Ambon terpisahkan oleh Teluk, yang membagi pulau Ambon kedua Jazirah, Jazirah Lei Hitu di Utara dan Jazirah Lei Timur. Jembatan Merah Putih yang memiliki Panjang 1.140 Meter, menjadikan jembatan merah putih merupakan jembatan terpanjang di Indonesia bagian Timur (Kompas: 4 April 2016).

Dalam mempercepat pembangunan pendidikan tinggi di Ambon Pemerintah Pusat lewat Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro melakukan pembangunan Kembali Universitas Pattimura. Universitas yang berada di kawasan Desa Poka, terdampak secara langsung dengan konflik 1999, banyak bangunan yang terbakar, rusak, kegiatan perkuliahan di pindahkan ke Kampus Universitas Pattimura yang ada di Kampus PGSD, yang terletak di kota Ambon. Terbakarnya kampus Pattimura Ambon, membawa kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, mengingat saat itu Universitas Pattimura adalah univertitas negeri satu satunya di Maluku.

Isu Kampus Universitas Pattimura merupakan salah isu yang dibahas dalam penyelesaian damai Malino II. Kampus Universitas Pattimura adalah salah satu isu konflik Ambon, beberapa langkah yang dilakukan untuk penyelesaian konflik di Universitas Pattimura, antara lain, pengangkatan dosen dan pegawai lewat *jalur perimbangan*, berdasarkan pertimbangan agama, kesempatan diberikan kepada calon dosen yang beragama Islam dan Katolik. (Yunus Serang, 2023) Pengangkatan dosen berdasarkan pertimbangan agama didasarkan kepada pertimbangan situasional untuk mengakomodir tuntutan pihak muslim dalam perjanjian Malino II.

Kebijakan pengangkatan dosen lewat *jalur perimbangan* merupakan hasil pertemuan antar Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr Mus Huliselan DEA, Pemda Maluku, dan para aktivis kampus, bersama Presiden Gus Dur di Kantor Gubernur yang bertempat di Kantor Gubernur Maluku. (Mahmaud Rengifurwarin, 2023) Dosen dan Pegawai Univesrsitas Pattimura *jalur perimbangan*, tidak hanya untuk

mengakomodir komunitas Muslim tetapi juga untuk komunitas Kristen Katolik, yang jumlahnya sedikit. Pertimbangan dosen, tetap mempertimbangan aspek kualitas dan kompetensi (Mus Huliselan, 2022).

Belajar dari pengalaman konflik Ambon, dimana terjadi kekurangan tenaga layanan medis, Rektor Universitas Pattimura yang baru dilantik pada tahun 2003, Prof. Dr. HB Tetelepta MPd. dengan dukungan pemerintah daerah mengusulkan pendirian Fakultas Kedokteran di Univeritas Pattimura. Tujuan pendirian Fakultas Kedokteran Univeritas Pattimura adalah menghasilkan lulusan dokter yang memiliki kompetensi, sebagai pelayanan kesehatan yang prima, berorientasi kepada masyarakat pesisir kepulauan. Fakultas kedokteran dilengkapi dengan Rumah Sakit Pendidikan Leimena di Univeritas Pattimura diharapkan, layanan kesehatan di berbagai wilayah terpencil di Maluku terlayani dengan baik.

Konflik Ambon memberikan pelajaran yang berharga bagi masyarakat. Perdamaian dapat terwujud berkat kerjasama semua pihak, pemerintah, tokoh masyarakat dan *civil society*. Sebagai Pembelajaran dari konflik Ambon, perlu dipikirkan manajemen masyarakat plural, sebagai tata kelola masyarakat yang majemuk yang komperhensif dan berkeadilan bagi semua identitas yang berbeda beda (Toni Pariela, 2023).

Pasca Konflik Ambon, TNI dan Polri bersama Pemda melakukan berbagai program untuk peningkatan kesejateran Masyarakat, terutama untuk memperkuat ketahan pangan. Program dari Pangdam XVI Pattimura (2015-2017) Mayjen Doni Monardo, yang dikenal dengan Emas Biru dan Emas Hijau, mendapat apresiasi yang tinggi dari masyakat Maluku. Program Emas Biru dan Emas Hijau adalah pelibatan masyakat dalam pengembangan sumber daya laut dan pertanian, yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyakat pesisir dan agraris di Maluku.

E. Penutup

Resolusi konflik Ambon, memberikan pelajaran berharga tidak hanya kepada masyakat Ambon, Maluku tetapi di Indonesia dan dunia, sulit dibayangkan konflik yang memakan banyak korban jiwa, dan harta benda, berlangsung dalam waktu, dapat ditemukan solusi

penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik di Indonesia, umumnya dilakukan dengan pendekatan keamanan dan penegakan hukum. Konflik Ambon menjadi contoh, penyelesaian konflik secara holistic, dengan menggunakan pendekatan 1) Keamanan, 2) Dialog Damai, 3) Mengoptimalkan Potensi Damai, 4) Perjanjian Damai, 5) Rehabilitasi & Penegakan Hukum.

Perdamaian di Ambon tercapai, lewat pendekatan tidak hanya oleh pemerintah pusat *top-down*, tetapi juga atas inisiatif dan peran aktif dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, Pemerintah Daerah *bottom up*. Perjanjian damai Ambon, yang ditandatangani di Malino II Sulawesi Selatan, tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, dari komunitas Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Islam, tetapi ikut menandatangani perwakilan pemerintah, sebagai representasi kehadiran negara, negara ikut bertanggungjawab menjaga dan mengawal perdamaian damai di Ambon. Negara harus memberikan perlindungan keamanan kepada semua warga negara, tanpa melihat status sosial.

Pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat di Ambon, Maluku. Banyak terjadi konflik agraris, yang melibatkan investor, pemerintah, TNI, Polri dan Masyarakat hukum adat, menjadi korban. Untuk menjaga, melindungi tanah adat, kelestarian budaya, adat istiadat Nusantra, kami mendesak kepada DPR dan Presiden untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Masyarakat Adat, yang telah masuk di Program Legislasi Nasional sejak tahun 2009.

Pengalaman dalam penyelesaian konflik Ambon, dapat dijadikan pembelajaran dalam menyelesaikan konflik *horizontal dan vertikal* yang belum terselesaikan sampai saat ini, misalnya konflik OPM Papua. Konflik Papua yang telah memakan banyak korban jiwa, baik di kalangan pemberontak maupun TNI Polri, pendekatan keamanan sampai saat ini belum menghentikan konflik di Papua. Kami mengusulkan agar pemerintah menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan Dialog Damai, melibatkan unsur pimpinan OPM (Organisasi Papua Merdeka) Kehadiran Jusuf Kalla dan timnya sangat dibutuhkan dalam penyelesaian kasus Papua. Hasil Resolusi konflik Ambon harus tetap dikawal, agar perdamaian di Ambon dan Maluku terus berkelanjutan, jangan sampai

generasi berikutnya melupakan peristiwa Konflik Ambon 1999-2002, dan mengulangi kesalahan yang sama.

Ucapan Terima Kasih

Hadirin Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Jakarta yang saya muliakan,

Saya menyadari bahwa semua yang di peroleh sampai hari ini adalah anugerah yang sangat luar biasadari Allah S.W.T dan tidak terlepas dari bantuanberbagai pihak. Pada kesempatan ini saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Prof Brian Yulianto, M.Eng, PhD
2. Ketua, Sekretaris dan Para Anggota Majelis Wali Amanat
3. Rektor Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Komarudin, M.Si., Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, Prof. Dr. Ifan Iskandar, M.Hum.; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Prof. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd.; Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Pd.; Wakil Rektor Bidang Kerja sama dan Bisnis, Dr. Andy Hadiyanto, M.A.
4. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Komisi Akademik UNJ yang telah memproses dan menyetujui usulan Guru Besar saya sehingga lancar dalam pencapaian Guru Besar.
5. Dalam suasana yang berbahagia ini saya jugamenghaturkan terima kasih kepada Kepala Bagian Kepegawaian baik tingkat universitas dan fakultas, Dekan dan para Wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial serta para kordinator Program Studi PIPS dilingkungan FISH UNJ yang telah membantu dan mendukung pencapaian gelar Guru Besar.
6. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Panitia Orasi Ilmiah Guru Besar Universitas Negeri Jakarta yang telah mempersiapkan dengan baik penyelenggaraan orasi ilmiah ini.
7. Terima kasih Kepada Para Dosen saya di Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Pattimura Ambon; Prof Drs. J Patikaihatsu, Alm. Drs. T.J.A Uneputty, Prof. Dr. Mus Huliselan DEA, Dr. H.B Tetelepta M, Pd, Alm Dra. R Patiselano, Alm Dra. E Samalo, Alm Dra. F Apitutey, Drs.

- SH Maelissa, Alm Dra. J Syaranamual, Alm Dr Usman Talib M,Hum, Alm Drs Isa Odar MSi, Dra. D Binnendyk M,Pd, Alm Drs. A, Batkunde M,Pd, Dr. S Tuwe M,Pd, Prof. Dr. P Rahabav MSi, Dr Ir Alwi Smith MSi
8. Terimakasih kepada sahabat saya, Dosen Prodi PIPS FISH UNJ, Drs. Muhammad Muctar M.Si, Alm Dr. Eko Siswono M.Si, Alm Dr. Nusaputra, Alm Drs. Bambu Segara, Prof. Dr. Desy Safitri M.Si, Prof. Dr. Budiaman M.Si, Martini S.H, M.H, Dr. Dian Alfia M.Si, Dr. Sujarwo M.Pd, Nova Scorviana MA, M.Si, Dr.Shahibah Yuliani M.Pd, Nandi Kurniawan M.Si, Saipiatuddin M.Si, Nurul Istiqomah M.Pd, Achmad Nur Hidayah M. Pd. Mbak, Siti Sarah SE. Sahabat saya, Biro Kepegawain yang banyak membantu Mbak Heni Kasinowati. Mbak Ani Apriyani, Mas Muhammad Dio Affrian SH.
 9. Terima Kasih kepada Pembimbing Tesis Prodi Ketahanan Nasional UGM, Prof. Dr. Armaidly Armawi M.Si, dan Alm Drs. Sugiono M.A.
 10. Terima Kasih Kepada Pembimbing Desertasi, Prof Dr. Kamarulnizam Abdullah, Prof Dr Nor Azizan
 11. Terima kasih kepada semua orang baik, yang pernah membantu saya selama perantauan mulai sejak 12 Juli 1991, di Ambon, Yogyakarta, Malaysia, Jakarta.
 12. Terima kasih kepada Letjen Pur Dr Nono Sampono M.Si, Prof Dr Djaali, Hamra Samal SH MH, Prof Dr Hafid Abbas, Ismail Dokumalamo MM, Prof M Zid M.Si, Alm Dr Umasi M.Si. Alm Prof Dr Sarkadi MSi, Mayor Pur. dr Amin Drakel Sp.OG H. Mochamad Fatgehipon S.E , Alm H. Hasanuddin S.E, Ibu Hj. Rugaya Yasin, Sahabat, Prof Dr Takko Bandung, Dr Rafifudin MSi, Prof Dr Darwis M.A, Dr Taufiq Salengke MA, Dr. Zulfikar Azwar Bin Tahir Lc, M.Pd, Kol. Dr. TNI Haposan Sijabat M.Si, Kol Dr. Heriadi M.Si,Suprianto Prasaga MA, Ismet, Zulkifli Buamona SE, Sardianto Syahri ST, Sarman Fokatea MSi, Arifin Umaternate S.H.
 13. Secara khusus saya ingin menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta (Ayah Alm Abbas Fatgehipon, Ibunda Musrina)
 14. Keluarga Ayahanda di Kepulauan Sula Maluku Utara, Kelurga Ibu Mangunsari Tulung Agung Jawa Timur.
 15. Bapak/Ibu Mertua yang banyak memberikan bantuan dan doa: Almarhum Wit Suwito, dan Ibu Endang Larasati di Yogyakarta

16. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada istri tercinta:
Dian Catur Septiarini SP
17. Permata kehidupanku, Muhammad Taqiyuddin, Nailah Mufidah,
Rafah Syakirah, Afiqah Azka, Muhammad Zabir

Akhirnya dengan mengucapkan syukur,Alhamdulillah saya akhiri penyampaian orasi ilmiah ini.

*Bilahirtaufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Media Massa

- Asyatri, H., Sukeski, K., & Yuliatry, Y. (2014). Diplomasi Hibrida: Perempuan dalam Resolusi Konflik Maluku. *Indonesia Journal of Womens Studies*.
- Conboy, K. (2018). *Intel II Medan Tempur Kedua*. Jakarta: Pustaka Primatama.
- Dwipayana, & Nazarudin. (2003). *Jejak Langka Pak Harto*. Jakarta: Karisma Bunda.
- Dokumen ANRI (2008). *Arsip Ambon di Era Kolonial Belanda*. Jakarta: ANRI.
- Fatgehipon, A. H (2022). *Resolusi Konflik Dalam Penyelesaian Konflik Konflik Sosial di Maluku (1999-2002)*. Jakarta: UNJ Press.
- Fatgehipon, A.H (2023). *Sejarah Kontemporer TNI dan Politik di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Fatgehipon, A. H. (2021). The Exodus of KNIL Soldiers from Maluku to The Netherlands in 1950s . *Tawarikh*.
- Fatgehipon, A. H. (2024). The Role of Indonesia National Armed Forces in The Civil Conflict in Maluku. *Internasional Conference ICHELSS, KnE Sosial Sciences*.
- Fatgehipon, A.H. (2023.). Multikultural Education Learning Model Through Sosial Studies Subjects for Junior High School Students in Maluku. 33.
- Hendropriyono, A. M. (2021). *Filsafat Intelejen Negara Demokrasi Republik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Huntington, S. (2003). *Prajurit dan Negara Teori dan Politik Hubungan Militer & Sipil*. Grasindo.
- M Rasid Ridh, M. M. (2018). Malino Kota Perdamaian dan Kawasan Gowa. *Pattingaloang Prodi Pendidikan Sejarah, FIS UNM, 1946-2002*.
- Miall, H., Ramsbothn, O., & Woodhouse, T. (2000). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. PT Raja Grafindo Jakarta.

- Manuputty, M. dkk. (1997). *Sejarah Hubungan Gandong Seith-Ouw*. Pusat Studi Maluku
- Pangabedan, S. R. (2018). *Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia*. Paramadina Jakarta.
- Peter Harris, dan Ben Reilly,(2000) *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar, Sejumlah Pilihan untuk Negosiator* IDEA, Jakarta
- Saimima, J. M. (2018). Kajian Hukum Adat Terhadap Konflik antar Negeri di Maluku Tengah (Kecamatan Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah). Volume 2 No. 1 .
- (2016). *Sambutan Jusuf Kalla, Seminar Nasional Lustrum XV dan Dies Natalis ke 75 UGM*.
- Tidore, B. (2020). *Resolusi Konflik Berbasis Teologi Bakubae, Studi Konflik Berbasis Teologi Bakubae, Studi Konflik Ambon Maluku 1999-2002*. YPM Tangerang.
- Tom Woodhouse, H. O. (2000). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. PT Raja Grafindo Jakarta.
- Trijono, L. (2001). *Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja Untuk Perdamaian Maluku, Keluar dari Kemelut Maluku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trijono, L. (2018). *Konflik dan Rekonsiliasi, Sebuah Pendekatan Transformatif*.

Media Masa

Kompas , 4 April 2016

Wawancara

Agus Ulahay, *Pastor Kota Ambon Pr Crisis Centre Katolik*.

Didi Setiadi, *Mayor Jenderal Purnawirawan Mantan Kepala Pangkalan TNI AL Halong Ambon 1999-2002. Perna Menjabat Gubernur AAL, Dan Seskoal*

Hilda Rolobessy, *Aktivis PMII yang aktif melakukan kegiatan kemanusiaan saat konflik Ambon*

Hadi Basalama, *Perserta Malino II, Dosen STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Ambon*

Dus Steijlen, *Guru Besar Universiteit Amsterdam, peneliti Gerakan RMS*

Irma Betaubun, *aktivis Perempuan Ambon berperan aktif dalam merintis perdamaian saat konflik Ambon*

John Ruhulesen, Dosen UKIM Ambon, Utusan Malino mewakili Komunitas Kristen Protestan

Jusuf Kalla, *Pencetus Perjanjian Malino II*

Luthfi Sanaky, *Peserta Malino II, Perwakilan Muslim Mantan Anggota DPRD.*

Mahmud Rengifurwarin, *Peserta Malino II, Ketua Badko HMI*

Mus Huliselan, *Guru Besar Antropologi Universitas Pattimura Rektor Universitas Pattimura 1993-2002.*

Sahlat Helut, *Jurnalis RCTI yang terlibat aktif peliputan selama konflik Ambon*

Nasir Rahawarin, Dosen Fakultas Teknik Perkapalan Unpatti, Utusan Malino UU Perwakilan Pengurus MUI Provinsi Maluku

Tony Pariela, *Guru Besar Sosiologi Universitas Pattimura Peserta Malino II Perwakilan Kristen Protestan. Mantan Dekan FISIP Unpatti(2018-2022)*

Yunus Serang, Perna menjabat Anggota DPRD, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Usulan Malino Ormas Islam

FOTO KELUARGA



RIWAYAT HIDUP



Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon, S.Pd., M.Si.

I. Identitas Diri

Nama Lengkap	Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon, S.Pd., M.Si.
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	Ternate, 28 Juli 1973
Agama	Islam
Jabatan Fungsional	Guru Besar
Pangkat /Golongan	Pembina Utama/ IV b
NIP	197307281998031002
NIDN	002807734
ID Scopus	6656937
Nama Istri	Dian Catur Septiarini SP
Nama Anak	1. Muhammad Taqiyuddin 2. Nailah Mufidah 3. Rafah Syakirah 4. Afiqah Azka 5. Muhammad Zabir

Alamat Kantor	Prodi Pendidikan IPS-FISH-UNJ Jl. Rawamangun Raya, Jakarta Timur
Mobile Phone	085319168241
Email	pertahanan@yahoo.com ah-fatgehipon@unj.ac.id
Alamat Rumah	Perumahan Griya Alam Indah Cibubur, No. A2, Jalan Transyogi Cibubur Bogor

II. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Pattimura Ambon	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	University Kebangsaan Malaysia
Tahun Masuk Tahun Lulus	1991-1996	1999-2002	2003-2007
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengembangan Peninggalan Sejarah Benteng Portugis Kalamata, untuk pembangunan pariwisata di Kota Ternate	Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Profesionalisme Prajurit Kostrad, Lokasi Penelitian. Markas Kostrad Jalan Merdeka & Divisi I Kostrad Cilodong	Hubungan Sipil dan Militer di Indonesia, Selepas era Pemerintahan Suharto
Nama Pembimbing/ Promotor	Pembimbing 1: Prof Dr HB Tetelepta M.Pd Pembimbing 2: Drs S Meilisa M, Hum	Pembimbing 1: Drs Sugiono MA Pembimbing 2: Prof Dr Armaidly Armawi MSi	Pembimbing 1: Prof Dr Kamarulnizam Abdulla MA Pembimbing 2: Prof Dr Nor Azizan Idris

III. Penghargaan yang Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-----	-------------------	-------------------------------	-------

1	Penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun	Presiden Republik Indonesia	2024
2	Penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun	Presiden Republik Indonesia	2017

IV. Pelatihan (5 Tahun Terakhir)

No.	Kegiatan	Tempat	Penyelenggara
1	Pelatihan Penelitian Survei, pengguna Narkoba	Jakarta	BNN
2	Pelatihan Pengawasan Pemilu	Jakarta	Bawaslu RI
3	Pelatihan Penggunaan Senjata Api	Jakarta	Perbakin

V. Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Institusi/ Lembaga	Jabatan	Jangka Waktu
1	1998- 2014	Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Pattimura	Dosen	16 Tahun
2		Kantor Wakil Rektor Bidang Perencanaan Dan Kerjasama Unpatti Ambon	Staf Perencanaan	
2	2004- 2006	Departemen Strategi dan Keamanan Universitas Kebangsaan Malaysia	Riset Asisten Profesor	2 Tahun
3	2010	STIKIP Muhammadiyah Manokwari Papua Barat	Dosen Datasering DIKTI	1 Semester

3	2012- 2013	Universitas Iqra Buru Provinsi Maluku, Kopertis Wilayah XII	Rektor	1 Tahun
4	2014 -	PIPS FISH UNJ	Dosen	11 Tahun
4	2014- 2016	DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI	Staf Ahli Wakil Ketua DPD RI	2 Tahun
4	2018- 2020	UNJ	Senat Universitas	2 Tahun
5	2020- 2021	UNJ	Koordinator Pusat, Sosial, Ekonomi & Humaniora LPPM	1 Tahun
6	2021- 2024	UNJ	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni FISH UNJ	3 Tahun
7		Badan Kesatuan Bangsa & Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Tim Pakar Perguruan Tinggi	2025- 2027

VI Keikutsertaan dalam Organisasi keilmuan atau Profesi

No.	Tahun	Jenis Organisasi	Jabatan
1	2007-2015	Masyarakat Sejarawan Indonesia	Sekretaris Wilayah Maluku
2	2016-	Asosiasi Dosen IPS	Anggota
3	2018-	Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan	Anggota

VII. Kegiatan Pendidikan & Pengajaran

	Mata Kuliah	Strata/ Jenjang
1	Filsafat Ilmu	S1
2	Pengantar Ilmu Sejarah	S1
3	Sejarah Dunia	S1
4	Sejarah Kontemporer	S2
5	Sejarah Indonesia	S1
6	Pengantar Ilmu Politik	S1
7	Konflik Sosial	S1
8	Pancasila	S1
9	Kewarganegaran	S1

VIII. Pengalaman Membimbing Mahasiswa

No.	Strata	Jumlah
1	Sarjana	600

IX. Penelitian 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul	Sumber Dana
1	2019	Prevelensi Penggunaan Narkoba Dikalangan Ibu Rumah Tangga di DKI	BNN (Badan Narkotik Nasional)
2	2020	Peran Sultan Tidore dalam Perjuangan Perebutan Irian Barat	Pemda Kota Tidore
3	2021	Resolusi konflik Dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Maluku 1999-2002	BLU LPPM Universitas
3	2021	Model Media Pembelajaran Video Scribe Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar	BLU Fakultas
4	2022	Membangun Kesadaran Wirausaha, BEM FIS UNJ, Di Era Digital	BLU LPPM Universitas
5	2023	Masjid Kampus dan pembinaan Karakter Mahasiswa	BLU Fakultas

6	2024	Minat Mahasiswa FIS UNJ Dalam Mengikuti Organisasi BEM	BLU Fakultas
7	2024	Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Ips Di Sekolah Dasar	BLU Fakultas
8	2025	Model Pembelajaran Problem Based Learning pada Mata Kuliah Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal dan Multikultural (Prodi PIPS FISH UNJ)	BLU Fakultas

X. Editor/ Reviewer Jurnal

Cakupan	Jurnal	Tahun
Nasional	Kementerian Pertahanan Jurnal Badiklat Kemhan	2024

XI. Kegiatan Pengabdian 5 Tahun Terakhir.

No.	Tahun	Judul	Penyelenggara
1	2020	Sosialisasi Dan Pembuatan Lubang Biopori Dalam Upaya Mengurangi Bencana Banjir Di Rptru Mardani Asri Cempaka Putih Jakarta Pusat	FISH
2	2020	Literasi Sejarah Bagi Siswa Sekolah Dasar di Kelurahan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta	FISH
3	2021	KKN Terintegrasi Covid 19, di Kelurahan Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat	LPPM UNJ
4	2022	Pelatihan Pembuatan Makanan Cemilan untuk pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid -19 Pada Ibu Ibu	FISH

Majelis Taklim di Perumahan Citra Indah Bogor			
5	2023	Strategi Pemasaran Makanan Cemilan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 Di Perumahan Bukit Cempaka Citra Indah Jonggol Bogor	FISH
6	2024	Motivasi dan Informasi Pendidikan tinggi di Perumahan Citra Indah Jonggol	FISH
7	2023	Edukasi Kelompok Guru dalam Membuat Video Model Pembelajaran	FISH
8	2024	Peningkatan Kepedulian Dalam Penguatan Karakter Kejujuran Pada Remaja	FISH
9	2025	Edukasi Pola Hidup Sehat Bagi Siswa di Indramayu	FISH
10	2025	Implementasi Coding Untuk Mengembangkan Bahan Ajar Guru di Kepulauan Seribu	FISH

XII. Publikasi & Jurnal

A. Jurnal Internasional/ Bereputasi, Penulis Pertama, 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul	Nama Jurnal
1	3 November 2019	LGBT Among Students: Case Study at Several Universities in Indonesia	International Journal Of Scientific Research https://www.ijstr.org
2	3 November 2019	Building Students State Defending Awareness in PrevindingThe Radicalism	International Journal Of Scientific Research https://www.ijstr.org

3	20 Februari 2021	Project Based Learning Model Based on Local Wisdom in Citizenship Education Courses to Prevent Radicalism among Students	Psychology and Education Jurnal http://psychologyanddeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4231
4	01 Maret 2021	Learning Barriers of Affirmation Program Students from Papua and West Papua at the Universitas Negeri Jakarta	Psychology and Education Jurnal http://psychologyanddeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4230
5	20 Maret 2023	The Conflict Transformation And Role Of Regional Representative Council (DPD RI) A Case Study Of Conflict Management Between Pt Freeport Indonesia And The Workers	Journal of Namibian Studies, History, Politics, Culture https://namibian-studies.com/index.php/JNS/index
6	08 Oktober 2023	Multicultural education through social studies subjects for junior high school students in Maluku, Indonesia	Issues in Educational Research https://www.iier.org.au/iier33/fatgehipon-abs.html

B. Jurnal Nasional

No.	Tahun	Judul	Nama Jurnal
1	2009	30 September Movement and the Emerging of the New Order Regime in Indonesia	Sosiohumanika 2 (1) 2009
2	2016	The Relationship Amongst Soeharto, Military, and	Paramita; Historical Studies Journal 26(1)

		Muslim in the end of new Order Regime	
3	2017	History of Indonesia Military Role in the Era of Independence Revolution 1945-1950	Tawarikh 8 (2)
4	2018	The Javanese Culture and Indonesia Civilian	Journal. Mindamas Https://journal.mindamas.com
5	1 April 2020	Political Conflict Between the DPRS Army and Sukarno : Case Study of the October 17, 52	Journal Article// Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS)
6	2020	Sultan Zainal Abidin Syah : From the Kingdom of Tidore to the Republic of Indonesia	Journal Mindams. https://www.journals.mindamas.com
7	30 April 2021	The Exodus of KNIL Soldiers from Maluku to the Netherlands in 1950s	Jurnal Tawarikh https://journals.mindamas.com/index.php/tawarikh/article/view/1437
8	30 November 2022	Presiden Soekarno dan Pembentukan Tidore sebagai Ibu Kota Provinsi Perjuangan Irian Barat	SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan
9	01 September 2023	Entrepreneurial Interest and Motivation Among Students, Case Study of BEM FIS UNJ Board Members	Jurnal Riset Manajmen Sains Indonesia 14(2) http:// Journal .unj ac.id
10	20 Desember	Program Edukasi, Kegiatan Pengabdian Masyarakat	https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/

ber 2020	Terintegrasi Covid -19 Di Kelurahan Rawasari Rt. 001 / Rw. 08 Jakarta Pusat.	snppm/article/view /19659
11	Faktor-Faktor Minat Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Organisasi	Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora https://journal.appi si.or.id/

C. Prosiding Nasional / Internasional

No.	Tahun	Judul	Nama Prosiding
1	2016	Dilema Pendidikan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Provinsi Maluku)	Konaspi (Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia) VIII 2016
2	2017	Peran Kampus dalam Membangun Integrasi Bangsa	Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu Ilmu Sosial
3	2022	BEM FIS Student Interest in Entrepreneurship in the Digital Era	International Conference on Humanities, Education, Law, and Social Sciences (ICHESS).
4	2023	Permasalahan Pengelolaan Masjid Kampus Masjid Al- Ijtima' FIS UNJ	Universitas Al Azar, https://eprints.Uai.ac.id
5	2024	The Role of Indonesian National Armed Forces in the Civil Conflict in Maluku	KnE Social Sciences https://kneopen.com/K nESocial/article/view/1 4844 International Conference on Humanities, Education,

			Law, and Social Sciences (ICHELSS).
6	2025	Declining Interest Among Students of the Faculty of Social Sciences at the University of Jakarta in Participating in Student Exective Body Organizational Activites	International Conference on Humanities, Education, Law, and Social Sciences (ICHELSS).

D. Penulisan Buku

No.	Judul Buku	Tahun	Penulis/Penerbit
1	Tentara dan Pergolakan Politik di Indonesia	2010	Abdul Haris Fatgehipon / PT Cahaya Pinelang Jakarta
2	Sultan Zainal Abidin Syah, Peran Perjuangan Pembebasan Irian Barat.	2020	Abdul Haris Fatgehipon, Mus Huliselan, Satrio Priyo Utomo, Suprianto Prasaga, Astri Febry Susanto / Lintas
3	Resolusi Konflik Dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Maluku (199-2002)	2022	Abdul Haris Fatgehipon / UNJ Press
4	Sejarah Polisi dan Citra Polisi di Indonesia, selepas reformasi	2023	Abdul Haris Fatgehipon / Uwais Inspirasi Indonesia
5	Sejarah Kontemporer TNI dan Politik di Indonesia	2024	Abdul Haris Fatgehipon /

			Uwais Inspirasi Indonesia
6	Hubungan Sipil dan Militer di era Presiden Joko Widodo	2024	Abdul Haris Fatgehipon / Uwais Inspirasi Indonesia
7	Bunga Rampai Budaya Demokrasi Dalam Perspektif Kearifan Lokal	2024	Abdul Haris Fatgehipon, Mus Huliselan / Widina
8	Bunga Rampai Transforming Society in the Post -Pandemic Era	2024	Abdul Haris Fatgehipon, Tresnani Anshoringsih / Rajawali Pers

XIV. Partisipasi Pembicara Dalam Lokakarya Workshop, Seminar Konferensi 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Kegiatan	Penyelenggara
1	12 Maret 2020	Peran Sultan Zainal Abidin Syah dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI	Pemda Kota Tidore
2	07 Maret 2022	Pelatihan dan Pendampingan MGMP pada Pemerintahan Kabupaten Mimika Dinas Pendidikan	Pemda Kota Timika
3	22 Maret 2022	Parler de Culture de Francais	Ikatan Alumni Prancis
4	21 Mei 2022	Kampus Sehat Bebas dari LGBT dan Free Sex	Kantor WR III UNJ

5	25 Agustus 2022	Pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Sosialisasi Angkatan II Tahun 2022	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6	10 Mei 2023	Kuliah Umum dan Bedah Buku ALDERA Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999	Rektorat UNJ
7	25 Juni 2023	"25 Tahun Peringatan Reformasi Indonesia - Bedah Buku Resolusi Konflik Sosial Maluku 1999-2002"	UNJ
8	17 Juni 2023	"77 Tahun Bhayangkara Indonesia" Bedah Buku : Sejarah Polisi dan Citra Polisi Selepas Reformasi 1998"	UNJ, Humas Mabes Polri, Kopolnas
9	23 Juli 2023	The 3rd HISPISI International Conference on Humanities, Education, of Social Sciences and Law (ICHELSS) 2023	ICHELSS
10	27 Juli 2023	Seminar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	PPID Provinsi DKI Jakarta
11	24 Sept. 2023	Public Discussion Foreign Investment and the Threat of Malay Existence (Case Study of Rempang Island)	Center for Strategic Studies
12	26 Nov. 2023	Comparison of Elections in Malaysia and Indonesia	Center for Strategic Studies
13	26 Nov. 2023	Pembekalan Pendidikan Dasar Satuan Resimen Mahasiswa Jayakarta	Komandan Resimen Mahasiswa

		Satuan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2003	Universitas Negeri Jakarta
14	20 Februari 2024	Budaya Demokrasi dalam Perspektif Kearifan Lokal pada PEMILU 2024 Seminar Nasional Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)	Asosiasi dosen Pancasila dan Kewarganegaraan
15	07 Maret 2024	Seminar Sosialisasi Kecintaan Produk dalam Negeri	Kementerian Perindustrian RI
16	22 April 2024	Forum Diskusi Budaya, Pusat Riset Masyarakat dan Budaya - Badan Riset dan Inovasi Nasional Kiprah Mr. T. H. Mohammad Hasan Dalam Arus Perjuangan Bangsa	BRIN (Badan Riset dan Inovasi
17	14 Mei 2024	Future SubmarineInternational Seminar & Showcase Indonesian Navy (Peserta)	TNI AL
18	29 Mei 2024	Evaluasi Penerapan Sistem Pemilu Menuju Pemilu yang Lebih Baik di Indonesia	Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
19	02 Juni 2024	Kegiatan Diskusi Publik : PRRI Permesta pemberontak atau penyelamat RI	FIS UNP
20	15 Juni 2024	Dampak Investasi Tambang Terhadap	Fakultas Ekonomi UNJ

Kehidupan Ekonomi dan Pertanian			
21	16 Juni 2024	Diskusi Publik Indonesia Darurat Judi Online Dan Pinjaman Online	FIS UNJ
22	01 Juli 2024	RUU Polri: Optimizing The Function or Threat of Democracy	BEM UNJ
23	10 Sep. 2024	Sosialisasi dan Diskusi Publik HMI Korkom Peran Mahasiswa dalam Pengawasan PILKADA Serentak Tahun 2024	Pengurus Korkom HMI
24	15-17 Nov. 2024	The 4th International Conference on Humanities, Education, Law and Social Sciences	(ICHELS)
25	22 Januari 2025	Parent Teaching Day	SMPIT Al Fityan Boarding School Bogor
26	2 Des. 2024	Masukan Pakar Mengkritisi RUU TNI	TNI AD
26	17 Maret 2025	Sosialisasi Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Kegiatan Pesantren Kilat Tahun 2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
27	21 Maret 2025	Mengawal Agenda Reformasi TNI	Korkom HMI UNJ
28	18 April 2025	Mengkritisi RUU TNI No 34 Tahun 2004	GM FKPPi

XIII. Hak Kekayaan Intelektual

No	Tahun	HKI
1	1 Agustus 2010	Tentara Dan Pergolakan Politik Di Indonesia

2	18 September 2018	Poster Edukasi COVID-19
3	1 Januari 2020	Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Pesisir Marunda
4	1 Juni 2020	Film Penilaian Masyarakat Indonesia Terhadap Kinerja Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19
5	01 Juni 2020	Film Layanan Pendidikan Anak Marjinal Studi Kasus Sekolah Master Depok
6	01 Juni 2020	Edukasi COVID-19 Pemakaman Jenazah Pasien COVID-19
7	1 Juni 2020	Edukasi COVID-19 Membangun Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Melalui Pola Makan Dan Olahraga
8	19 Juni 2020	Video Veteran Distabilitas Yang Berprestasi
9	19 Juni 2020	Video Biografi Sultan Zainal Abidin Syah
10	19 Juni 2020	Veteran Perang Seroja Timor Timur
11	18 Juli 2020	Edukasi Covid -19membangun Kesadaran Masyarakat Betapa Pentingnya Mengisolasi Diri Di Rumah Saja
12	09 Desember 2021	Resolusi Konflik Dalam Penyelesaian Konflik Di Maluku 1999-2002
13	09 Desember 2021	Pembuatan Camilan Banana Crunchy Untuk Kegiatan Wirausaha Majelis Taklim Bukit Cempaka Perumahan Citra Indah Cileungs
14	1 September 2022	Karya Rekaman Video "Museum Nasional"
15	01 September 2022	Karya Rekaman Video museum Jendral Besar A.H Nasution
16	19 Juni 2020	Video Wawancara Warakawuri
17	22 Juni 2024	Bunga Rampai Budaya Demokrasi Dalam Perspektif Kearifan Lokal

18	09 November 2023	Perangkat Pembelajaran Online
19	22 Juni 2023	Minat Dan Motivasi Berwirausaha Di Kalangan Mahasiswa (Studi Deskriptif Pengurus BEM FIS UNJ)
20	13 Februari 2023	Karya Rekaman Video Kunjungan Ke Museum Polri
21	13 Februari 2023	Modul Identifikasi Masalah Sosial Di Bojong Gede
22	13 Februari 2023	Modul Permasalahan Ekonomi Di Cipinang Muara
23	13 Februari 2023	Modul Seks Bebas di Kalangan Anak Muda



Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH)
Universitas Negeri Jakarta
Gedung K, Kampus A - UNJ
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
<https://fis.unj.ac.id>